

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGAWASAN KEGIATAN REKLAMASI PASCA TAMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

Baberto Tumanggor

20.C1.0139

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

2024

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dimana salah satu sumber daya alam tersebut merupakan pertambangan mineral dan batubara. Dalam pengaturan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diatur oleh pemerintah, dimana pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Pertambangan mineral dan batu menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup, dimana dalam upaya untuk memperbaiki lingkungan hidup tersebut dapat dilakukan dengan reklamasi dan pasca tambang.

Berdasarkan hal tersebut terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam kegiatan reklamasi dan pasca tambang? (2) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam kegiatan reklamasi dan pascatambang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang memiliki objek penelitian pengaturan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam reklamasi dan pasca tambang pada pertambangan mineral dan batubara. Pengumpulan data yang digunakan merupakan data sekunder, dimana akan dilakukan analisis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, serta buku dan jurnal yang berkaitan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan mengenai seluruh peraturan Perundang-undangan yang mengatur serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah mengenai kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Kata Kunci: **Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, Reklamasi dan Pasca Tambang**